

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN UMKM**

##### **DI DISNAKERPERINKOPUKM KABUPATEN KUDUS**

Penulis melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus. Penulis akan memaparkan hasil penelitian secara kualitatif berdasarkan kajian pustaka, observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan dari penelitian yaitu untuk mendiskripsikan dan mengetahui apakah pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan baik/ efektif atau belum.

Hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk jawaban yang merupakan hasil dari wawancara dengan beberapa informan. Informan yang diwawancarai dalam penelitian merupakan narasumber yang dinilai berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang disajikan berupa data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan wawancara. Data primer tersebut merupakan data mengenai proses pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kudus. Kegiatan pengembangan UMKM ini dilakukan dan disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun pada Renstra terkait kegiatan pengembangan, hal ini dapat dilihat dari produktivitas yang sudah dilakukan, motivasi, adaptasi, dan integritas guna untuk

melakukan pengembangan usaha. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dihasilkan

### **3.1 Produktivitas**

Secara umum produktivitas diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan keluaran/ produktivitas yang sudah dihasilkan suatu organisasi/ seseorang. Dalam pelaksanaan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus, produktivitas/ kegiatan yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan pengembangan UMKM antara lain : pengadaan pelatihan pengembangan usaha, pendampingan pengajuan permodalan KUP, pengadaan pamran pengenalan produk umkm Kudus, fasilitasi pengurusan sertifikasi Halal dan Hki.

Dilihat pada pelaksanaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus dalam rangka menyejahterakan dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kudus. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Abi Wibowo selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM :

“Pada pelaksanaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus ini kita melakukan beberapa upaya untuk melakukan pengembangan umkm tersebut. Sejauh ini upaya yang sudah kita lakukan dalam melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus ini yaitu, Fasilitasi umkm. Fasilitasi tersebut seperti permodalan dalam KUP dan pendampingan KUR, legalitas usaha : PIRT, serfikasi halal dan Hak Kekayaan Intelektual.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau melanjutkan :

“Selain fasilitasi permodalan dan legalitas, kami juga mengadakan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah terkait UMKM dan wawasan kewirausahaan. Selain itu juga kita mengadakan kepelatihan kepada

umkm. Dalam pelatihan tersebut kita melatih para pelaku umkm agar lebih terampil dalam hasil produksinya, dan juga pelatihan terkait tentang pengemasan produk agar produk yang dihasilkan menarik di pasaran.”

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Rofiq Fachri, SH.ME sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi UKM :

“Salah satu tujuan dari dinas kami yaitu memajukan umkm yang ada di Kudus. Untuk memajukan umkm tersebut perlu dilakukan beberapa upaya, yaitu fasilitasi permodalan, legalitas usaha, sosialisasi, pelatihan produksi, dan pengenalan hasil produk.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau menambahkan :

“Pada pelatihan produksi itu sendiri kita adakan setiap tahunnya, yaitu dengan beberapa jenis pelatihan seperti pelatihan bidang tata boga, konveksi dan bordir. Pelatihan umkm ini juga gratis tidak dipungut biaya sedikitpun. Tujuan diadakannya pelatihan ini diharapkan agar pelaku umkm ini lebih terampil dalam hasil produksinya, dan hasil produk yang mereka hasilkan mampu bersaing di pasaran dan tidak kalah saing dengan produk luar.”

Selanjutnya diungkapkan oleh Ibu Mahmudah W, SH sebagai Kepala Seksi Pengembangan Promosi, Produksi Dan Pembiayaan UKM

“Upaya yang sudah kita lakukan untuk pengembangan umkm ini yaitu kita memfasilitasi umkm yaitu seperti permodalan, legalitas usaha, pelatihan, promosi produk. Untuk promosi produk biasanya kami mengirimkan umkm terpilih untuk mewakili kabupaten Kudus untuk mengikuti pameran diluar Kpta maupun Provinsi. Dan untuk di kabupaten sendiri kami juga mengadakan Pameran Expo UMKM Kudus setiap tahunnya, dimana pesertanya yaitu usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten kudus itu sendiri. Syarat untuk mengikuti pameran itu yaitu usaha masih aktif beroperasi, produk menarik dan layak untuk dipamerkan dan gratis tanpa dipungut biaya.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau menambahkan :

“Untuk legalitas usaha seperti sertifikasi halal, Haki, dan PIRT kami hanya menjadi sarana untuk mendapatkan legalitas tersebut, karena yang berhak mengurus legalitas tersebut yaitu Dinas Provinsi. Kami hanya memberikan sarana seperti mengurus pengumpulan persyaratan yang sudah ditentukan kemudian kami kirim ke Provinsi kemudian disana akan diproses.”

Produktivitas dapat diartikan sebagai hasil keluaran yang sudah dilakukan oleh suatu organisasi/ seseorang. Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus melakukan upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengadaan pelatihan, pendampingan permodalan, fasilitas pengurusan sertifikasi Halal dan Hki dan pengadaan pameran pengenalan produk. Kegiatan-kegiatan tersebut guna untuk melakukan pengembangan UMKM. Penulis menyimpulkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terkhusus Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus bidang Koperasi dan UKM yaitu antara lain : Memberi fasilitasi kepada UMKM di Kabupeten Kudus seperti Legalitas Usaha, Permodalan, Pelatihan, Promosi Produk dan Sosialisasi terkait UMKM dan wawasan kewirausahaan.

Dijelaskan pada hasil wawancara dari ketiga sumber menyebutkan bahwa untuk melakukan pemberdayaan UMKM di Kudus dalam upaya mengembangkan umkm Kudus ada beberapa upaya yang dilakukan pihak dinas untuk mengembangkan umkm di Kudus itu sendiri, yang pertama yakni dinas menyediakan platihan bagi pelaku umkm untuk meningkatkan usahanya. Untuk kepelatihan ini ada 2 jenis pelatihan yaitu Tata Boga dan Konveksi. Untuk tata

boga itu sendiri ada 8 jenis pelatihan yaitu antara lain : pelatihan usaha produksi kue basah, pelatihan produksi kue kering, pelatihan usaha produksi puding, pelatihan usaha produksi aneka minuman, pelatihan produksi olahan bahan singkong, pelatihan usaha produksi aneka bakery, pelatihan usaha produksi aneka cake, dan pelatihan usaha produksi olahan ikan. Untuk jenis pelatihan konveksi ada dua jenis pelatihan yaitu pelatihan pembuatan busana muslim dan pelatihan pembuatan pakaian wanita.

Kuota masing-masing jenis pelatihan yaitu 35 orang per jenis pelatihan. Apabila salah satu jenis pelatihan sudah terpenuhi kuotanya maka akan disarankan untuk mengikuti jenis pelatihan lainnya. Selain itu juga, untuk mengikuti pelatihan ini harus mengumpulkan persyaratan guna untuk mengikuti pelatihan, dan mengisi formulir pelatihan untuk mengikuti pelatihan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, berikut persyaratan yang harus di kumpulkan oleh pelaku umkm :

1. Formulir pendaftaran
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku (1 lembar)
3. Fotocopy KK (1 lembar)
4. Pas Foto 4 x 6 (2 lembar)
5. Surat keterangan dari Desa domisili bahwa memiliki usaha.

**Tabel 3.1**  
**Data Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2013	240
2014	245
2015	253
2016	257
2017	261

*Sumber : Disnakerperinkopukm Kudus*

Pengenalan produk UMKM di Kabupaten Kudus ini dengan dilakukannya pameran baik di dalam kota sendiri ataupun dilakukan di luar kota bahkan dilakukan di luar provinsi. Untuk di Kudus sendiri, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM khususnya bidang UKM mengadakan Pameran Expo yang dilakukan setiap tahunnya. Pameran expo yang dilakukan di kota sendiri ini memberikan peluang bagi pelaku umkm di Kabupaten Kudus untuk mengenalkan produk yang di hasilkan mereka sendiri. Selain itu juga, tujuan dari dilakukannya pameran expo ini untuk mempromosikan produk umkm di kudus sehingga hasil produk mereka mampu bersaing dengan hasil produk luar. Untuk pesyaratan mengikuti pameran yaitu masih aktif produksi dalam usaha dan produk menarik. Berikut adalah kegiatan pameran yang dilakukan di luar Kota Kudus :

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Pameran 2016 dan 2017**

1	Nama Pameran	Pameran Produk Unggulan Koprasi, UKM Dan PKBL 20	Gebyar Umkm, Koperasi Dan PKBL Expo Ke 8 Industri	Kalbar Expo	Pameran Produk Kreatif Dan Inovasi Unggulan Daerah 2016	Gebyar Produk Unggulan Nasional	Pameran Craft Indo 2016
---	--------------	--	---	-------------	---	---------------------------------	-------------------------

			Kreatif				
2	Waktu	21-24 April 2016	26-29 Mei 2016	25-28 Agustus 2016	8-11 September 2016	27-20 Oktober 2016	11-13 November 2016
3	Lokasi/Tempat	Java Supermall Semarang	JEC Yogyakarta	Pontianak Convention Center (PCC)	Yogya xpo Center (JEC)	MOG Malang	Mall The Park
4	Jumlah Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand
5	UMKM Peserta Pameran						
	-NamaUMKM	Kelompok UMKM Kudus	Lies Indriyati	H. Zaenal Arifin	Arif Bachtiar	M Ma'ruf	HJ Sa'adah
	- Nama Usaha	KEC	Sari Busana	Karomah	Alia Collection	Kenia	Bordir Dahlia
	-Jenis Produk	Aneka Produk	Konveksi	Jenang	Hijab/Kerudung	Jenang	Bordir
	-Alamat	Garung Lor 7/2	Bordir Jl KHR Aswani	Kaliputu 1/2	Janggalan 6/1	Sunggingan No.156	Peganggaran
	-NamaUMKM	Kelompok UMKM Padurenan	Masqudi	Kurniati S	Yuli Astuti	Rani Diah Susanti	Nono Anik Sulastri
	- Nama Usaha		Jenang Menara	Ghaida Collection	Muria Batik	UD Lancar	Prima Pradndita
	-Jenis Produk	Aneka produk konveksi, bordir	Jenang	Konveksi Sarung Instan	Batik	Konveksi	Kopi dan Teh Rempah
	-Alamat	Padurenan 3/4	Kaliputu 3/2	Bakalan Krapyak 3/4	Karangmalang 4/2	Getas Pejaten 1/3	Bakalan Krapyak 4/2

1	Nama Pameran	Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL Expo	Pameran OTODA	Batam Investment, Tourism And Trade Expo	Serayu Expo	Yogya Expo 2017	Jabar Smesco Expo 2017	MIATTEX Expo 2017
2	Waktu	10-13 Maret 2017	21-23 April 2017	10-13 Agustus 2017	24-27 Agustus 2017	15-18 September 2017	19-22 Oktober 2017	2-5 November 2017
3	Lokasi/Tempat	Java Supermall	Alun-alun Sidoarjo	Mega Mall Batam	Stadion Soemitro	Malioboro Mall	Festival City Link	Epicentrum Mall Mataram

		Semarang		Center	Kolopaking Banjarnegara	Yogya	Bnadung	
4	Jumlah Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand	2 (dua) Stand
5	UMKM Peserta Pameran							
	-NamaUMKM	Eni Zunita	Zanal Abidin	M. Ma'ruf	Mustofa Afifi	Arif Bachtiar	Alin Alxander	Siti Khalimah
	- Nama Usaha	Bordir Jasmine	Pandawa	Kenia	Tas Trandy	Aila Collection	Mahkota Gading	Alima Embroidery Bordir
	-Jenis Produk	Bordir	Konveksi	Jenang	Tas Sekola/ Wanita Getas	Hijab	Bordir	Karangmal ang
	-Alamat	Pegunungan	Padurenan	Kaliputu		Janggalan	Janggalan	
	-NamaUMKM	Farikhah	Zaenal Arifin Karomah	Nurul Khoiyatul Nurmah	Ali Esmanto	Ardian Herawati Elfaz Scarf	Nikmawati Inaya Batik Manjing Batik	Nono Anik
	- Nama Usaha	Raff Bordir Bordir			Jenang Armina Jenang			Prima Prdnadita Kopi, teh, rempeh
	-Jenis Produk		Jenang	Bordir		Mukena Bordir		
	-Alamat	Pegunungan	Kaliputu	Padurenan	Termulus	Dersalam	Colo	Bakalan krapyak
	NamaUMKM	Yuli Astuti		Wulan Septika	Prihatin, dkk	Iqbal Cs	Siti Kholidah dkk	Siti Aminah
	- Nama Usaha	Muria Batik		Botani Food Nusantara	Kelompok fasilitasi halal	Kelompok Ayo Maju Terus Aneka Snack Bulung Cangkring	Kelompok Pondok Kreasi Aneka Snack karangbener	Azzida Collection
	-Jenis Produk	Batik		Bakpia,kopi	Aneka Snack			Krudung
	-Alamat	Karangmalan g		Jl. Kudus- colo	Mlati Kidul			Gtas Pejaten

Sumber : Disanakerperinkopukm Kudus

Kegiatan pendampingan sertifikasi Halal dan Hki juga sangatlah diperlukan guna untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha melalui sertifikasi Halal dan Haki bagi usaha mikro kecil dan menengah dapat mempengaruhi perkembangan sektor usaha, salah satu diantaranya dapat meningkatkan pendapatan usaha. Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen dalam mengkonsumsi makanan terutama bagi kaum

muslim. Sedangkan haki berupa merk dagang produk yang dipasarkan telah memiliki identitas sehingga mudah dikenal apalagi dengan sistem pemasaran secara online seperti sekarang ini. Pemerintah melalui Tim Penanggulangan Hak Kekayaan Intelektual dan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementrian dan HAM sudah berjuang keras untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik merk dan pemegang hak cipta.

Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus bidang Koperasi dan UKM melakukan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi Halal dan Haki bagi umkm yang ada di Kabupaten Kudus, disini juga Disnakerperinkopukm memberikan pelayanan pembuatan surat keterangan usaha termasuk kategori umkm. Dimana surat keterangan ini berfungsi untuk mendapatkan keringan biaya untuk mengurus Haki yaitu menjadi Rp.600.000, dimana jika tidak melapirkan surat tersebut dikenakan biaya normal yaitu Rp.1.000.000. Selain itu juga Disnakerperinkopukm Kudus memiliki tugas untuk mengusulkan daftar umkm yang akan mengurus sertifikasi Halal dan Haki kemudian diserahkan/ diusulkan ke Dinas UMKM Provinsi Jateng.

**Tabel 3.3**

**Daftar Usulan Merek/ HKI**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Merek Yang Diusulkan</b>
1.	2016	Muhtamat	Tas Sekolah	Pagazo
		Shanti Tri Astuti	Alat Praga Pembelajaran	1. Rudder Card 2. Kartu Kemudi Pintar 3. Kartur Bundar
2.	2017	Endang Sri Hartini	Jenang	1. Mubaligh 2. Legenda 3. Sinar Mulia
		Mulyo Budi	Jasa Laundry	1. Doze

		Winarso		2. Deter Soft 3. Pantura Wangi
		Sutarwi	Bakso Ayam Dalam Kemasan	1. Ada Rasa TRW 2. Ada Raja TRW 3. Ada Ratu TRW
		Koperasi Kopatra Sele	Lentog Tanjung	1. Lentog Tanjung
		Laksmana Pratama Putra	Makanan	1. Pa Opanfood
3.	2018	Siti Mufarikhah	Bordir	1. Raff Bordir
		HJ. Sa'adah	Bordir	1. Dahlia Bordir
		Siti Khalimah	Bordir	1. Alima 2. EL-Yas
		Zaenal Abidin	Kemeja Dan Jaket	1. D Renand Collection 2. Azza Clothing 3. Pandawa Collection

*Sumber : Disnakerperinkopukm Kudus*

Program KUP saat ini menjadi program andalan Pemkab Kudus unruk membantu permodalan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Program KUP tanpa agunan dengan sasaran pelaku umkm Kudus digulirkan sejak 10 Maret 2015, dan telah disalurkan melalui Bank Jateng. Sementara semenjak 2017, penyaluran KUP juga diperluas dengan melibatkan PD Bank Pasar. Proram KUP, bunga hanya 0,9% tanpa agunan. Bunga dibawah 1% sudah termasuk biaya penjaminan, administrasi dan biaya produksi. Ada 4 kartu kategori untuk berbagai bidang usaha, masing-masing memiliki kelas jumlah maksimal pinjaman yang berbeda. Keempat kartu tersebut adalah warna merah untuk pinjaman maksimal Rp. 5 Juta, warna biru maksimal pinjaman Rp. 10 Juta, warna hijau maksimal Rp. 15 Juta, dan warna abu-abu maksimal Rp. 20 Juta. Mereka yang dibidik sebagai penerima KUP ini adalah usaha mikro kecil dan menengah.

Persyaratan Kredit Usaha Produktif Mikro :

1. Pas Photo pemohon kredit & suami/istri ukuran 4x6 warna (2 lembar)
2. Foto Copy E-KTP pemohon kredit & suami/ istri (2 lembar)
3. Foto Copy kartu keluarga (KK) dan surat nikah
4. Berdomisili di kota Kudus dan mempunyai –KTP Kudus
5. Gambar denah lokasi usaha pemohon
6. Surat keterangan usaha dari Desa/ surat rekomendasi dari Dinas terkait.

Berdasarkan wawancara diatas dan dengan tunjukannya beberapa data, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pengembangan UMKM ini melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Pengadaan pelatihan pengembangan bagi pelaku UMKM, dari hasil wawancara menyebutkan bahwa pelatihan ini dilakukan satu tahun sekali dan dari data yang telah didapatku juga menunjukkan bahwa kepelatihan ini sudah dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya, dari data menunjukkan bahwa jumlah peserta pelatihan setiap tahunnya meningkat.
2. Pengenalan produk, dari hasil wawancara menyebutkan bahwa Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus ini setiap tahunnya melakukan kegiatan pengenalan produk UMKM dengan mengadakan pameran Expo di dalam kota maupun di luar kota. Dari data yang telah didapatkan menunjukkan bahwa Disnakerperinkopukm Kudus mengirimkan beberapa UMKM terpilih untuk mengikuti pameran UMKM di luar kota bahkan diluar provinsi.

3. Pendampingan permodalan (KUP) Disnakerperinkopukm Kudus juga melakukan kegiatan kepengurusan permodalan. Dan dari penjelasan data yang dipaparkan juga menunjukkan bahwa Disnakerperinkopukm berperan sebagai pembuatan surat keterangan UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Fasilitasi pengurusan Halal dan Hki, dari wawancara menyebutkan bahwa Disnakerperinkopukm juga memiliki peran dalam kepengurusan masalah sertifikasi. Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa Disnakerperinkopukm Kudus setiap tahun mengusulkan beberapa UMKM untuk kepengurusan sertifikasi.

#### **4.2 Motivasi**

Motivasi, keterikatan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. dalam menjalankan suatu pelayanan harus memiliki dorongan atau harapan agar bagaimana suatu pelayanan tersebut dapat tercapai tujuannya. Motivasi yang digunakan untuk pencapaian tujuan suatu program umkm adalah terletak pada visi pada renstra.

Dilihat pada pelaksanaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus dalam rangka menyejahterakan dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kudus, pasti memiliki motivasi mengapa dilakukannya pengembangan umkm tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Abi Wibowo selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM :

“Salah satu tujuan kami dan yang kami harapkan untuk umkm di Kudus ini yaitu menyejahterakan masyarakat, khususnya umkm di Kabupaten Kudus, karena ini merupakan tugas kami melayani masyarakat dengan memberikan sarana untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kudus. Sudah kita ketahui bahwa Kudus merupakan salah satu daerah yang memiliki industri yang besar. Untuk itu kita sebagai Dinas yang berhubungan dengan umkm di Kabupaten Kudus kita harus memberdayakan umkm agar umkm kita tidak kalah saing dengan produk luar kota bahkan manca negara.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau menambahkan :

“Salah satu visi dari Kabupaten Kudus yakni Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu kita sebagai pemerintah daerah memiliki tugas dan bertanggungjawab dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu juga harapan kita memberdayakan umkm yaitu diharapkan pendapatan/ penghasilan dari produk yang sudah dihasilkan oleh pelaku umkm yang meningkat, apabila pendapatan/ penghasilan mereka meningkat maka kesejahteraan mereka meningkat pula.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Mahmudah W, SH sebagai Kepala

Seksi Pengembangan Promosi, Produksi Dan Pembiayaan UKM :

“Sejauh ini kami sudah melakukan berbagai upaya yang sudah ditetapkan guna untuk melakukan pengembangan umkm dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kudus. Dorongan kami untuk melakukan pengembangan pada umkm ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau menambahkan :

“Pada intinya kami disini berkerja untuk melayani masyarakat terkhusus pada bidang umkm, dimana disini kita harus berkerja semaksimal mungkin agar perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil yang ada di Kudus ini dapat maju dan mampu berdaya saing dengan produk luar. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kudus,

sehingga taraf hidup mereka akan meningkat, apabila taraf hidup mereka meningkat maka bisa dikatakan hidup mereka sejahtera. Karena kepuasan kami akan terbayar apabila umkm yang kami bimbing tersebut dapat berkembang lebih maju sehingga taraf hidup dan ekonomi mereka meningkat.

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Rofiq Fachri, SH.ME sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi UKM :

“Motivasi kita dalam melayani masyarakat khususnya umkm yaitu dengan tujuan untuk menyejahterakan umkm yang ada di Kudus, karena tugas kami untuk memberdayakan umkm di Kudus ini. Seperti halnya salah satu misi dari Kabupaten Kudus yaitu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Misi tersebut adalah sebagai patokan kami dalam melayani umkm di Kabupaten Kudus”

Beliau menambahkan:

“Selain itu, motivasi yang dibutuhkan oleh pegawai Disnakerperinkop yaitu Kabupaten Kudus yaitu kebutuhan rasa aman, seperti jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Selain kebutuhan rasa aman, pegawai Disnakerperinkop juga membutuhkan kebutuhan fisiologis yaitu pemenuhan kebutuhan masing-masing melalui gaji yang pegawai dapatkan sesuai dengan jabatan mereka.”

Terkait tentang motivasi, motivasi sangat diperlukan untuk pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu, motivasi Disnakerperinkop untuk pemberdayaan umkm mengaju pada visi Disnakerperinkop khususnya bidang umkm yaitu untuk memajukan umkm yang berdaya saing.

Hal tersebut tertuang Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus adalah :“ ***Mewujudkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Kemandirian Industri, Koperasi dan UMKM Yang Berdaya Saing*** “. Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai makna bahwa para pencari kerja akan selalu terfasilitasi informasi pasar kerja dan penempatan kerja serta pelatihan kerja sedangkan para pekerja akan selalu terlindungi hak-haknya.

Kemandirian Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), mengandung makna bahwa pelaku usaha dibidang industri, koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya yang didukung dengan kemampuannya sendiri baik dari kemampuan manajerial, permodalan dan akses pemasarannya tanpa harus dukungan dari pemerintah maupun pihak lain.

Kelembagaan usaha di bidang Industri Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya saing mempunyai makna bahwa pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk berkompetisi dengan pelaku usaha lain baik dalam kualitas dan pemasaran hasil produksi serta menjadi panutan aktifitas ekonomi daerah lain.

Dilihat dari wawancara yang sudah di paparkan oleh narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendorong/ motivasi dalam Disnakerperinkopukm melakukan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus yaitu sesuai denan salah satu misi Kabupaten Kudus yaitu menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus. selain itu juga pemenuhan kebutuhan internal pegawai Disnakerperinkopukm Kudus yaitu melalui gaji dan jaminan-jaminan yang mereka dapatkan. Denagan motivasi seperti ini diharapkan UMKM dapat

bersaing di pasaran, bahkan diharapkan produk dari UMKM Kudus mampu menguasai pasar nasional bahkan internasional. Apabila UMKM sudah berkembang maka dapat dipastikan taraf hidup masyarakat meningkat melalui UMKM. Hal senada juga tertuang pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa “UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya yang didukung dengan kemampuannya sendiri baik dari kemampuan manajerial, permodalan dan akses pemasarannya tanpa harus dukungan dari pemerintah maupun pihak lain.” Pada kenyataannya juga yang sudah dijelaskan pada wawancara diatas yang sudah dijelaskan oleh narasumber bahwas yang menjadi motivasi/dorongan untuk memberdayaakan UMKM yakni untuk meningkatkan kualitas UMKM agar mampu berdaya saing di pasaran, sehingga taraf hidup masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Kudus akan meningkat melali UMKM.

### **4.3 Adaptasi**

Adaptasi, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal, selain itu juga value atau nilai suatu organisasi di mata masyarakat. Kemampuan pegawai Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada resnstra dan lkjip.

Berdasarkan pada pelaksanaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus yang sudah dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah

Kabupaten Kudus, pada awalnya pasti melakukan suatu penyesuaian suatu program tersebut dibuat dan bagaimana suatu program tersebut berjalan dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Abi Wibowo selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM :

“Untuk penyesuaian internal organisasi yaitu pegawainya sendiri yaitu seperti penyesuaian terhadap rencana strategis (renstra). Sudah kita ketahui bahwa renstra disusun untuk 5 tahun kedepan, apabila sudah berjalan 5 tahun maka perlu menyusun kembali renstra 5 tahun yang akan datang. Untuk pergantian dari renstra sebelumnya ke renstra yang akan dilaksanakan maka sebagai pegawai harus menyesuaikan sistem kerja dan pelayanannya sesuai pada renstra yang sudah disusun. Untuk lingkungan eksternal seperti penyesuaian terhadap masyarakat, pada awalnya kami perlu melakukan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat apa saja yang di butuhkan terkait dengan usaha mereka, seperti halnya kebutuhan untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian kami membuat suatu program-program yang bertujuan untuk bagaimana umkm dapat berkembang. Kemudian kita memperkenalkan kepada masyarakat suatu program tersebut dan tujuan diadakannya program pengembangan umkm tersebut sangat dibutuhkan agar usaha mereka dapat berkembang.”  
(wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau melanjutkan :

“Setelah memperkenalkan program pengembangan umkm tersebut kita mengajak masyarakat untuk mengikuti program pengembangan umkm tersebut seperti halnya mengikuti sosialisasi dan mengikuti pelatihan guna untuk meningkatkan hasil produksi yang mereka hasilkan sehingga mampu bersaing di pasaran. Penyesuaian kepada masyarakat memang sangatlah dibutuhkan guna kita mengetahui kebutuhan yang di butuhkan masyarakat,”

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Rofiq Fachri, SH.ME sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi sebagai berikut :

“Penyesuaian Dinas kepada masyarakat sangatlah penting, dengan cara kita menyesuaikan diri kepada masyarakat kita dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang

dibutuhkan itu apa saja terkait dengan harapan mereka akan usaha yang mereka jalankan. Dengan penyesuaian dinas pada masyarakat, masyarakat dapat memberi penilaian terhadap program yang dibuat oleh instansi. Selain itu juga kita sebagai pegawai harus berkerja sesuai tupoksi dan renstra yang sudah disusun, kemudian tugas kami merealisasikan dari renstra tersebut agar tercapai suatu tujuan organisasi dan pastinya umkm Kabupaten Kudus agar mampu berkembang dengan baik dan mampu berdaya saing dengan produk luar.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Kemudian diungkapkan oleh Ibu Mahmudah W, SH sebagai Kepala Seksi Pengembangan Promosi, Produksi Dan Pembiayaan UKM :

“Dalam melaksanakan tugas kita mengacu pada Renstra yang berisi visi, misi dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Para pegawai sudah tidak gaptek meskipun tidak menguasai komputer secara mahir. Pemberian wewenang dan komunikasi yang terjadi dalam organisasi membantu pelaksanaan tugas yang saya lakukan. Perubahan misi dan strategi pasti dilakukan melalui renstra yang dibuat setiap lima tahun. Kemampuan pegawai ya relatif sesuai dengan pendidikan..”

Adaptasi atau penyesuaian pegawai sesuai dengan program dan peraturan yang sudah dibuat sangatlah penting, dimana pegawai dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan atau baru disusun. Pada Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus ini, pegawai dinas bidang koperasi dan UKM dalam mewujudkan UMKM yang berdaya saing mengacu pada renstra pada rencana program kegiatan terkait UMKM dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi mereka yang sudah ditentukan pada renstra tersebut. Berikut rencana program dan kegiatan serta tupoksi pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM sesuai pada Renstra :

#### A. Rencana Program dan Kegiatan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :
    - a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah.
    - b. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah.
  2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah :
    - a. Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
    - b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat.
  3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
    - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
    - b. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- #### B. Tupoksi Bidang Koperasi dan UKM
1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi verifikasi penerbitan izin usaha simpan pinjam, persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi, fasilitasi pembentukan koperasi baru, pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

(KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP)/kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP), pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola koperasi, pemberdayaan, perlindungan dan pemberian sanksi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- A. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, pengembangan, promosi, produksi, pembiayaan dan sumber daya manusia serta teknologi usaha kecil dan menengah;
- B. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, pengembangan, promosi, produksi, pembiayaan dan sumber daya manusia serta teknologi usaha kecil dan menengah;
- C. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- D. Pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi;
- E. Fasilitasi pembentukan koperasi baru;
- F. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, kantor cabang koperasi simpan pinjam (ksp) yang berada di wilayah kabupaten;

- G. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, kantor cabang koperasi simpan pinjam (ksp) yang berada di wilayah kabupaten;
- H. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola koperasi;
- I. Pemberdayaan, perlindungan dan pemberian sanksi kepada koperasi yang berada di wilayah kabupaten;
- J. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan kemudahan perizinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- K. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- L. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- M. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh seksi-seksi :

- 1) Seksi Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,

penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemberian izin koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan dan sanksi bagi koperasi.

- 2) Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengembangan usaha mikro melalui pendataan, penguatan kelembagaan, promosi, revitalisasi pasar, pemanfaatan kreatifitas dan inovasi serta pembiayaan yang kompetitif.
- 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, pengembangan dan penerapan teknologi bagi usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha.

Berdasarkan wawancara diatas yang telah dipaparkan oleh narasumber dan berdasarkan data mengenai adaptasi internal organisasi

pegawai harus menyesuaikan diri sesuai pada Renstra dalam menjalankan tugas sesuai pada rencana program dan kegiatan yang sudah disusun pada renstra dan harus sesuai tupoksi masing-masing. Penulis menyimpulkan bahwa yang pertama penyesuaian dilakukan di lingkungan internal terlebih dahulu yakni dengan pegawai berkerja sesuai rencana program dan kegiatan serta tupoksi sesuai dengan renstra yang sudah dibuat sehingga diharapkan mampu tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua yaitu penyesuaian dinas kepada masyarakat sangatlah penting, dengan kita menyesuaikan pada masyarakat kita dapat mengetahui kemauan dan yang diharapkan oleh masyarakat akan usaha yang mereka jalankan. Setelah mampu menyesuaikan dengan masyarakat, dinas mampu mengambil langkah-langkah apa saja yang akan dinas lakukan untuk mengatasi permasalahan atau pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat akan usaha mereka kedepannya. Diharapkan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus.

#### **1.4 Integrasi**

Integrasi adalah tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Jadi disini melihat bagaimana kemampuan suatu organisasi dalam penyampaian kepada masyarakat atau pada organisasi lainnya. Dinsakerperinkopukm Kabupaten Kudus untuk penyampaian suatu informasi dilakukan dengan

sosialisasi langsung kepada umkm, membuat brosur dan juga membuat pengumuman di website Dinas.

Berdasarkan pada pelaksanaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus yang sudah dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kudus, disini kita juga harus melihat bagaimana cara berkomunikasi suatu organisasi kepada masyarakat atau pada organisasi lainnya. Hal ini dapat dijelaskan oleh Bapak Drs. Abi Wibowo selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM :

“Untuk penyampaian informasi terkait dengan pemberdayaan umkm, disini dinas perlu menyampaikan informasi bahwa keberadaan dinas kami khususnya bidang umkm yaitu untuk memberdayakan umkm. Untuk menyampaikan informasi tersebut maka diperlukannya suatu komunikasi kepada masyarakat akan adanya program pemberdayaan umkm di Kabupaten Kudus. Bentuk penyampaian informasi tersebut kita sampaikan melalui sosialisasi kepada umkm, seperti halnya informasi akan diadakan kepelatihan, legalisasi usaha, pemeran produk, dan informasi terkait dengan permodalan untuk usaha. Selain itu juga kita juga membuat brosur akan diadakannya kepelatihan yang disebar diseluruh desa yang ada di Kabupaten Kudus. Dengan cara seperti itu masyarakat memperoleh informasi. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus dengan jelas agar masyarakat juga paham apa yang kita informasikan kepada mereka. (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Rofiq Fachri, SH.ME sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi sebagai berikut :

“Keberhasilan suatu program itu juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tersebut, agar masyarakat berpartisipasi untuk mengikuti suatu program tersebut maka dilihat kembali sejauhmana suatu organisasi tersebut dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat akan adanya suatu program tersebut. Jadi dalam menyampaikan program pemberdayaan umkm di Kabupaten Kudus,

kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah mengenai pengembangan umkm. Disini kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa melakukan pengembangan usaha mereka sangatlah diperlukan agar usaha mereka tetap berjalan dan bahkan berkembang dan mampu bersaing dengan produk lain.” (wawancara pada tanggal 16 November 2017)

Beliau menambahkan :

“Selain melalui sosialisasi kita juga menginformasikan melalui website Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Selain itu juga kita juga membuat brosur kemudian kami sebarkan keseluruh Desa yang ada di Kabupaten Kudus. Contohnya: kami membuat brosur kepelatihan. Dimana kita mengadakan kepelatihan bagi pelaku umkm setiap tahunnya. Untuk memberikan informasi diadakannya kepelatihan tersebut kami membuat brosur kepelatihan beserta persyaratan untuk mengikuti kepelatihan tersebut kemudian kami sebar brosur tersebut ke seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kudus.”

Integrasi atau kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada sasaran yang dituju oleh suatu organisasi tersebut. Kemampuan bersosialisasi yang dilakukan Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus yaitu dengan melakukan berbagai sosialisasi langsung kepada umkm terkait dengan program umkm. Selain dilakukan sosialisasi secara langsung untuk menyampaikan informasi, juga dilakukan dengan cara menggunakan brosur dan pengumuman melalui website Dinas.

Sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM juga dilakukan oleh Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. Sosialisasi yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi tentang kewirausahaan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku umkm dalam berwirausaha dan pelaku umkm ini memiliki strategi dan kemampuan yang mumpuni dalam

berwirausaha, sehingga apabila kemampuan mereka dianggap mampu maka dapat dipastikan mereka akan mampu berdaya saing. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan pengadaan pelatihan pengembangan usaha. Selain bersosialisasi secara langsung, Disnakerperinkopukm juga menyampaikan suatu informasi melalui brosur, brosur tersebut berisi tentang pengumuman/informasi yang akan disampaikan oleh Dinas untuk menginformasikan suatu kegiatan

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Peserta Sosialisasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2013	240
2014	245
2015	253
2016	257
2017	261

*Sumber : Disnakerperinkopukm Kudus*

Berdasarkan wawancara diatas yang sudah dipaparkan oleh narasumber terkait dengan integrasi Disnakerperinkopukm Kudus kepada masyarakat khususnya UMKM, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu program yang di buat untuk memberdayakan umkm di Kabupaten Kudus tersebut juga di dukung dengan adanya partisipasi masyarakat/ pelaku umkm itu sendiri. Agar partisipasi masyarakat tinggi dan banyak maka sebelumnya di perlukannya komunikasi dari organisasi kepada masyarakat itu sendiri. Untuk itu komunikasi itu sangatlah diperlukan agar

harapan yang kita inginkan tersebut dapat mencapai tujuannya. Penyampaian informasi mengenai penyediaan pengembangan umkm ini disampaikan melalui sosialisasi kepada pelaku umkm. Dengan penyampaian komunikasi baik dan benar sehingga yang organisasi maksudnya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat maka di perlukan komunikasi dengan baik dan benar pula. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Disnakerprinkopukm melakukan sosialisasi tentang kewirausahaan dan membuat brosur untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengadaan kegiatan pengembangan usaha.